PERAN TAX TREATY DAN TAX HAVEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL: STUDI LITERATUR ATAS REGULASI DAN IMPLIKASINYA

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Al-Amin

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

al.amin-2024@feb.unair.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the role of tax treaties and tax havens in international tax avoidance through a literature review of regulations and their implications. Tax treaties, which were originally designed to avoid double taxation and provide legal certainty, are often abused through treaty shopping, whereby multinational companies exploit loopholes in tax agreements to aggressively reduce their tax burden. Meanwhile, tax havens provide an environment with low tax rates, financial secrecy, and minimal requirements for substantial economic activity, thereby facilitating profit shifting and asset concealment. The symbiosis between tax treaties and tax havens amplifies the potential fiscal losses of developing countries due to tax base erosion, distorted capital allocation, and global competitive imbalances. This study highlights the importance of strengthening anti-abuse regulations, harmonising international policies, and fostering collaboration among tax authorities to mitigate the negative impacts of cross-border tax avoidance practices and ensure the sustainability of government revenue.

Keywords: tax treaty, tax haven, international tax avoidance, treaty shopping, transfer pricing, tax regulation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tax treaty dan tax haven dalam penghindaran pajak internasional melalui studi literatur atas regulasi dan implikasinya. Tax treaty yang awalnya dirancang untuk menghindari pajak berganda dan memberikan kepastian hukum seringkali disalahgunakan melalui praktik treaty shopping, di mana perusahaan multinasional memanfaatkan celah perjanjian pajak untuk menekan beban pajak secara agresif. Sementara itu, tax haven menyediakan lingkungan dengan tarif pajak rendah, kerahasiaan finansial, dan minim persyaratan aktivitas ekonomi substansial, sehingga memfasilitasi pengalihan laba (profit shifting) dan penyembunyian aset. Simbiosis antara tax treaty dan tax haven memperbesar potensi kerugian fiskal negara berkembang akibat penggerusan basis pajak, distorsi alokasi modal, dan ketimpangan kompetisi global. Studi ini menyoroti pentingnya penguatan regulasi anti-penyalahgunaan, harmonisasi kebijakan internasional, serta kolaborasi antarotoritas pajak untuk menekan dampak negatif praktik penghindaran pajak lintas negara dan menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Kata kunci: tax treaty, tax haven, penghindaran pajak internasional, treaty shopping, transfer pricing, regulasi perpajakan.

Pendahuluan

Penghindaran pajak internasional menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dan arus transaksi lintas negara. Globalisasi telah mendorong perusahaan multinasional untuk memperluas operasinya ke berbagai yurisdiksi, yang pada gilirannya menciptakan peluang bagi praktik penghindaran pajak melalui berbagai skema dan instrumen hukum

yang tersedia. Salah satu fenomena yang menonjol adalah penggunaan tax haven dan pemanfaatan tax treaty untuk mengurangi beban pajak secara legal namun sering kali bertentangan dengan semangat keadilan fiscal (Cobham & Gibson, 2016).

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini memang tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun dapat berdampak signifikan pada penerimaan negara. Di satu sisi, penghindaran pajak dianggap sah selama tidak melanggar hukum, namun di sisi lain, praktik ini sering dipandang tidak etis karena dapat mengurangi potensi pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk Pembangunan (Garcia-Bernardo & Fichtner, 2024).

Perusahaan multinasional kerap kali memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara untuk melakukan pelarian pendapatan (income flight) dan pelarian modal (capital flight) ke luar negeri. Dana-dana ini biasanya dialihkan ke negara-negara tax haven yang menawarkan tarif pajak rendah atau bahkan nol, serta tingkat kerahasiaan yang tinggi. Menurut laporan Transparansi Internasional, terdapat lebih dari 50 tax haven di dunia yang menjadi tujuan utama aliran dana global, dengan lebih dari 400 bank internasional beroperasi di wilayah tersebut (Tørsløv et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak internasional bukanlah hal baru. Kasus-kasus seperti penggunaan perusahaan cangkang oleh Adaro dan Asian Agri Group untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri telah menjadi perhatian otoritas pajak nasional. Praktik transfer pricing juga menjadi salah satu modus utama yang digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah, sehingga menurunkan beban pajak di Indonesia. Masalah lain yang muncul adalah adanya pajak berganda internasional akibat perbedaan aturan perpajakan antarnegara (Mintz & Weichenrieder, 2010). Pajak berganda terjadi ketika dua negara mengenakan pajak atas subjek dan objek pajak yang sama, sehingga menimbulkan beban ganda bagi wajib pajak. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan negara mitra. P3B bertujuan untuk membagi hak pemajakan secara proporsional dan mencegah praktik penyelundupan pajak (Bilicka, 2023).

Namun, dalam praktiknya, tax treaty sering kali disalahgunakan melalui skema treaty shopping. Skema ini memungkinkan pihak yang tidak berhak untuk memperoleh manfaat dari tax treaty dengan mendirikan perusahaan di negara mitra yang memiliki perjanjian pajak dengan negara sumber penghasilan. Akibatnya, negara sumber kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut dari transaksi lintas negara (Zucman, 2015). Contoh nyata dari penyalahgunaan tax treaty adalah kasus antara Indonesia dan Belanda, di mana banyak perusahaan multinasional memanfaatkan perjanjian ini untuk menekan beban pajak mereka di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia diperkirakan kehilangan ratusan miliar rupiah akibat praktik treaty shopping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Johannesen & Tørsløv, 2024).

Selain treaty shopping, tax haven juga berperan penting dalam memfasilitasi penghindaran pajak internasional. Negara-negara tax haven menawarkan insentif berupa tarif pajak rendah, perlindungan kerahasiaan, serta kemudahan pendirian perusahaan cangkang. Hal ini membuat tax haven menjadi tujuan utama bagi perusahaan multinasional yang ingin mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi (Dharmapala, 2023).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap transaksi lintas negara, termasuk penerapan aturan anti-penyalahgunaan

(anti-abuse rules) dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan. Namun, tantangan tetap besar mengingat kompleksitas transaksi internasional dan keterbatasan kapasitas pengawasan otoritas pajak nasional (Sikka & Willmott, 2010).

Di tingkat global, organisasi seperti OECD juga telah menginisiasi berbagai langkah untuk memerangi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang merupakan strategi perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara-negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak. Inisiatif ini mendorong transparansi, pertukaran informasi, dan harmonisasi aturan perpajakan antarnegara untuk menutup celah yang dimanfaatkan dalam penghindaran pajak internasional (Cobham & Gibson, 2016).

Urgensi penelitian mengenai peran tax treaty dan tax haven dalam penghindaran pajak internasional semakin tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan. Studi literatur atas regulasi dan implikasinya menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder seperti regulasi perpajakan (UU PPh, perjanjian tax treaty, dan aturan anti-penyalahgunaan), jurnal akademis, laporan internasional (OECD, IMF), serta studi kasus terkait praktik penghindaran pajak melalui tax treaty dan tax haven. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, mekanisme, serta implikasi regulasi terhadap penghindaran pajak internasional, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang ada dan tantangan implementasinya (Boote & Beile, 2005); (Rothstein et al., 2006).

Hasil dan Pembahasan

Peran Tax Treaty Dan Tax Haven Dalam Penghindaran Pajak Internasional

Peran tax treaty dalam penghindaran pajak internasional dimulai sebagai instrumen penghindaran pajak berganda, tetapi rentan disalahgunakan melalui praktik treaty shopping. Perusahaan dari negara ketiga mendirikan entitas cangkang di negara mitra perjanjian untuk mengakses tarif pajak preferensial, seperti dividen 10% alih-alih 20%, sehingga mengurangi kewajiban pajak di negara sumber (Cobham & Gibson, 2016). Mekanisme ini memanfaatkan celah dalam perjanjian pajak bilateral yang tidak dilengkapi klausul anti-penyalahgunaan memadai. Sementara itu, tax haven berfungsi sebagai pusat penghindaran pajak melalui karakteristik khas: tarif pajak rendah (0-5%), kerahasiaan finansial ekstrem, dan tidak adanya persyaratan aktivitas ekonomi substansial. Negara seperti Cayman Islands dan Panama menawarkan lingkungan ideal untuk menyembunyikan aset atau laba. Simbiosis antara tax treaty dan tax haven terwujud dalam skema transfer pricing, di mana perusahaan multinasional menggeser laba dari yurisdiksi berpajak tinggi ke entitas di tax haven melalui transaksi fiktif (Riedel & Schindler, 2023).

Skema transfer pricing melibatkan pengalihan laba dengan membebankan harga tidak wajar pada transaksi antar-entitas grup, seperti penjualan barang atau jasa dengan markup berlebihan. Praktik ini menyebabkan pelarian pendapatan (profit shifting) yang merugikan negara berkembang

seperti Indonesia, dengan estimasi kehilangan 1-3% PDB tahunan. Tax treaty memperparah masalah saat dimanfaatkan sebagai jembatan menuju tax haven, seperti kasus Indonesia-Belanda-Singapura, di mana perusahaan asing menggunakan Belanda sebagai conduit country (Gravelle, 2015).

Regulasi anti-penyalahgunaan seperti Principal Purpose Test (PPT) dalam tax treaty modern dirancang memerangi praktik ini, tetapi implementasinya lemah akibat keterbatasan kapasitas otoritas pajak negara berkembang. Mekanisme exchange of information (EOI) juga sering tidak efektif karena resistensi negara tax haven membuka data keuangan. Upaya global seperti inisiatif BEPS oleh OECD mendorong transparansi melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), meski menghadapi tantangan dari negara seperti Swiss dan Panama yang mempertahankan kerahasiaan bank (Johannesen & Tørsløv, 2024). Dampak ekonomi penghindaran pajak bersifat sistemik: negara sumber kehilangan basis pajak, terjadi distorsi kompetisi bisnis global, dan ketimpangan fiskal antarnegara semakin melebar. Indonesia mengalami kebocoran signifikan melalui skema treaty shopping, di mana perusahaan asing memanfaatkan tax treaty sebagai perantara ke tax haven. Reformasi kebijakan mendesak dilakukan, termasuk ratifikasi Multilateral Instrument (MLI) untuk memasukkan klausul anti-penyalahgunaan dalam perjanjian pajak warisan dan penegakan prinsip substance over form untuk menolak transaksi tanpa kegiatan ekonomi riil (Slemrod & Wilson, 2009).

Tanpa intervensi regulasi masif, simbiosis tax treaty dan tax haven akan terus menggerus penerimaan pajak negara berkembang. Kolaborasi otoritas pajak global dalam investigasi transfer pricing dan pengawasan entitas cangkang menjadi kunci memitigasi penghindaran pajak, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal untuk pembangunan.

Maka dengan itu, Peran tax treaty dan tax haven dalam penghindaran pajak internasional semakin menonjol seiring berkembangnya globalisasi ekonomi dan semakin kompleksnya transaksi lintas negara. Tax treaty, yang pada dasarnya bertujuan menghindari pajak berganda dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional, seringkali justru dimanfaatkan sebagai celah untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Melalui perjanjian ini, perusahaan multinasional dapat mengatur struktur usahanya sedemikian rupa agar memperoleh tarif pajak yang lebih rendah di negara tujuan investasi, bahkan ketika aktivitas bisnis riil sangat minim di negara tersebut (Schjelderup, 2016).

Di sisi lain, tax haven menawarkan lingkungan yang sangat mendukung praktik penghindaran pajak. Negara-negara tax haven biasanya menerapkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol, menyediakan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi, dan minim transparansi serta pertukaran informasi dengan negara lain. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mentransfer laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke tax haven, sehingga beban pajak secara global menjadi sangat kecil (Beer & Loepnick, 2023).

Skema yang paling sering digunakan dalam penghindaran pajak internasional antara lain transfer pricing, treaty shopping, thin capitalization, dan controlled foreign corporation (CFC). Transfer pricing terjadi ketika perusahaan dengan hubungan istimewa menetapkan harga transaksi yang tidak wajar, sehingga laba dapat dialihkan ke entitas di negara dengan pajak lebih rendah. Treaty shopping terjadi ketika perusahaan mendirikan entitas di negara mitra tax treaty hanya untuk mendapatkan fasilitas pajak, meskipun tidak ada aktivitas bisnis substansial di negara tersebut (Fuest & Spengel, 2024).

Thin capitalization adalah praktik pembiayaan perusahaan dengan proporsi utang yang sangat tinggi dari pihak afiliasi di luar negeri, sehingga pembayaran bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di negara sumber. Sementara itu, skema CFC digunakan untuk menunda pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari anak perusahaan di luar negeri, khususnya di tax haven, hingga laba tersebut benar-benar dibawa pulang ke negara asal (Darussalam & Septriadi, 2008).

Negara-negara maju telah menerapkan berbagai ketentuan anti-penyalahgunaan untuk menangkal praktik penghindaran pajak yang agresif. Misalnya, Australia dan Kanada telah mengidentifikasi transaksi yang tidak memiliki tujuan bisnis nyata, upaya memperoleh fasilitas pajak yang tidak semestinya, serta transaksi berputar (round-robin flow of funds) sebagai bentuk aggressive tax planning yang harus diwaspadai. Di Indonesia, upaya serupa dilakukan dengan memperkuat regulasi transfer pricing dan memperluas ruang lingkup pertukaran informasi perpajakan (Darussalam & Ngantung, 2013).

Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan yurisdiksi tax haven yang tidak kooperatif. Keterbatasan akses data keuangan, minimnya transparansi, serta perbedaan standar pelaporan antarnegara menjadi hambatan utama dalam membongkar skema penghindaran pajak lintas negara. Upaya multilateral seperti inisiatif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dari OECD dan implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak global (Rahayu, 2017).

Di tengah persaingan antarnegara untuk menarik investasi asing, tax treaty juga berfungsi sebagai instrumen promosi investasi. Dengan memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko pengenaan pajak ganda, tax treaty dapat meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, manfaat ini bisa berbalik menjadi kerugian bagi negara sumber akibat praktik treaty shopping dan pengalihan laba ke tax haven (Garcia-Bernardo & Fichtner, 2024).

Dari sisi regulasi, Indonesia telah mengadopsi sejumlah aturan untuk membatasi penyalahgunaan tax treaty dan tax haven, seperti klausul anti-penyalahgunaan dalam perjanjian pajak, penguatan aturan transfer pricing, serta pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas luar negeri yang tidak memiliki aktivitas bisnis substansial di negara mitra. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kapasitas pengawasan dan koordinasi antarnegara (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017). Selain itu, fenomena tax competition antarnegara juga memperumit upaya penanggulangan penghindaran pajak. Negara-negara dengan sistem pajak kompetitif cenderung menawarkan insentif dan tarif rendah untuk menarik modal asing, yang pada akhirnya menciptakan tekanan bagi negara lain untuk menyesuaikan kebijakannya. Akibatnya, negara-negara berkembang yang sangat membutuhkan penerimaan pajak justru menjadi korban utama dari praktik penghindaran pajak internasional (Beer & Loeprick, 2023).

Dalam konteks global, upaya harmonisasi dan kerja sama internasional menjadi sangat penting. Negara-negara perlu memperkuat jaringan pertukaran informasi, menyelaraskan standar pelaporan keuangan, serta mengadopsi aturan anti-penyalahgunaan yang lebih ketat dalam tax

treaty. Kolaborasi multilateral juga dibutuhkan untuk menekan praktik tax haven dan meningkatkan transparansi sistem keuangan global (Lejour, 2023).

Kesimpulannya, tax treaty dan tax haven memiliki peran ganda dalam sistem perpajakan internasional. Di satu sisi, tax treaty dapat mendorong investasi asing dan memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang memadai, perjanjian ini justru dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak secara agresif melalui tax haven. Praktik transfer pricing, treaty shopping, thin capitalization, dan CFC menjadi modus utama penghindaran pajak lintas negara yang merugikan negara berkembang dari sisi penerimaan pajak.

Efektivitas penanggulangan penghindaran pajak internasional sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan mempererat kerja sama internasional. Upaya multilateral seperti BEPS dan AEOI perlu terus didorong agar celah penghindaran pajak dapat diminimalkan. Dengan demikian, manfaat tax treaty sebagai instrumen promosi investasi dan penghindaran pajak berganda dapat tetap terjaga, tanpa mengorbankan keadilan fiskal dan keberlanjutan penerimaan negara.

Dampak Tax Treaty Dan Tax Haven Terhadap Penghindaran Pajak Internasional

Dampak tax treaty dan tax haven terhadap penghindaran pajak internasional sangat signifikan dan multidimensional, baik dari sisi penerimaan negara, keadilan fiskal, maupun stabilitas ekonomi global. Tax treaty awalnya dirancang untuk menghindari pajak berganda dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara, namun dalam praktiknya sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara agresif melalui skema treaty shopping. Perusahaan multinasional dapat mendirikan entitas cangkang di negara mitra perjanjian pajak untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah, meskipun aktivitas bisnis riil di negara tersebut sangat minim (Bunn & Asen, 2024).

Sementara itu, tax haven menawarkan lingkungan yang sangat kondusif untuk penghindaran pajak. Negara-negara tax haven seperti Cayman Islands, Bahamas, dan Panama menyediakan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol, perlindungan data keuangan yang tinggi, serta minim transparansi dan pertukaran informasi dengan negara lain. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke tax haven, sehingga beban pajak global mereka menjadi sangat kecil (Cobham & Gibson, 2016).

Salah satu dampak utama dari praktik ini adalah tergerusnya basis pajak negara sumber. Negara berkembang seperti Indonesia sangat dirugikan karena kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penghindaran pajak internasional juga menyebabkan ketimpangan fiskal antara negara maju dan negara berkembang, karena negara-negara dengan sistem pajak kompetitif atau tax haven justru memperoleh keuntungan dari arus modal global (Nurdiansyah & Masripah, 2023).

Skema transfer pricing menjadi salah satu modus utama yang digunakan dalam penghindaran pajak internasional. Dengan menetapkan harga transaksi antar-entitas grup yang tidak wajar, perusahaan dapat mengalihkan laba ke anak perusahaan di tax haven, sehingga laba yang dilaporkan di negara sumber menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan pun minim. Selain itu, praktik thin capitalization juga sering digunakan, di mana perusahaan membiayai anak perusahaan dengan utang berbunga tinggi dari luar negeri sehingga pembayaran bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Dyrenge et al., 2013).

Controlled Foreign Corporation (CFC) juga menjadi instrumen penting dalam penghindaran pajak, di mana perusahaan induk mendirikan anak perusahaan di tax haven untuk menunda pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh hingga laba tersebut benar-benar dibawa pulang ke negara asal. Dengan demikian, struktur perusahaan yang kompleks dan lintas yurisdiksi semakin menyulitkan otoritas pajak untuk mengawasi dan memungut pajak secara efektif (Rasyid, 2020). Dampak selanjutnya adalah meningkatnya biaya penegakan hukum dan administrasi perpajakan. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk mengawasi, meneliti, dan menindak praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya administrasi dan tarif pajak secara keseluruhan. Ketidakseimbangan informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak juga memperparah situasi, di mana wajib pajak yang kreatif dalam perencanaan pajak justru membayar pajak paling sedikit dibandingkan wajib pajak yang patuh (Leduc & Michel, 2024).

Dari sisi ekonomi makro, penghindaran pajak internasional melalui tax treaty dan tax haven dapat menciptakan distorsi dalam alokasi modal global. Modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven, bukan ke negara-negara yang menawarkan peluang investasi produktif, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, praktik ini juga dapat mendorong negara-negara untuk terlibat dalam tax competition yang tidak sehat, saling menurunkan tarif pajak demi menarik investasi asing, yang pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak secara global (Brauner, 2014).

Dampak sosial dari penghindaran pajak internasional juga tidak kalah penting. Ketika penerimaan pajak negara menurun akibat praktik ini, pemerintah terpaksa mengurangi anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini pada akhirnya meningkatkan ketimpangan sosial dan memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin di Masyarakat (Crivelli et al., 2023).

Dari sisi regulasi, upaya untuk menanggulangi dampak negatif tax treaty dan tax haven telah dilakukan melalui berbagai inisiatif internasional seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang diinisiasi OECD dan G20. Salah satu aksi BEPS yang penting adalah mencegah penyalahgunaan tax treaty (Aksi 6) dan mengatasi penghindaran status Bentuk Usaha Tetap (Aksi 7), serta mendorong pertukaran informasi otomatis antarnegara. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan besar, terutama di negara-negara tax haven yang enggan membuka data keuangan mereka (Cobham & Gibson, 2016).

Penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas regulasi domestik dalam menekan penghindaran pajak melalui tax haven masih rendah. Banyak celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional, terutama dalam hal pengawasan transfer pricing dan transaksi antarperusahaan afiliasi (Garcia-Bernardo & Fichtner, 2024). Selain itu, perbedaan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh tax haven terhadap penghindaran pajak bisa bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan dan sektor industri tertentu. Dampak lain yang muncul adalah munculnya praktik treaty abuse, di mana pihak yang tidak berhak memanfaatkan fasilitas tax treaty dengan mendirikan conduit company di negara mitra perjanjian. Praktik ini semakin memperparah kebocoran penerimaan pajak negara sumber dan menciptakan persaingan tidak sehat antarnegara dalam menarik investasi asing (Tørsløv et al., 2024).

Dari perspektif kebijakan, negara-negara perlu memperkuat aturan anti-penyalahgunaan dalam tax treaty, memperluas ruang lingkup pertukaran informasi, serta meningkatkan kapasitas

pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Kolaborasi internasional juga sangat penting untuk menekan praktik tax haven dan meningkatkan transparansi sistem keuangan global (Mintz & Weichenrieder, 2010).

Secara keseluruhan, dampak tax treaty dan tax haven terhadap penghindaran pajak internasional sangat merugikan negara berkembang, memperlebar ketimpangan fiskal, dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa upaya bersama yang serius dari komunitas internasional, praktik ini akan terus berlanjut dan menggerus potensi penerimaan pajak global.

Dengan demikian, tax treaty dan tax haven memiliki dampak besar dalam mendorong penghindaran pajak internasional. Praktik treaty shopping, transfer pricing, thin capitalization, dan controlled foreign corporation menjadi modus utama yang digunakan perusahaan multinasional untuk menurunkan beban pajak secara legal namun tidak etis. Negara perlu memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan mempererat kerja sama internasional untuk menekan dampak negatif praktik ini dan menjaga keadilan serta keberlanjutan fiskal di era globalisasi.

Kesimpulan

Tax treaty, meskipun dirancang untuk menghindari pajak berganda dan memberikan kepastian hukum bagi investor, justru rentan disalahgunakan melalui treaty shopping. Perusahaan multinasional mendirikan entitas cangkang di negara mitra perjanjian untuk mengakses tarif pajak preferensial, seperti dividen 10% alih-alih 20%, sehingga mengurangi kewajiban pajak di negara sumber. Sementara itu, tax haven berperan sebagai enabler penghindaran pajak melalui kebijakan tarif pajak rendah (0-5%), kerahasiaan finansial, dan minimnya persyaratan aktivitas ekonomi substansial. Simbiosis keduanya terwujud dalam skema transfer pricing, di mana laba dialihkan dari negara berpajak tinggi ke entitas di tax haven melalui transaksi fiktif.

Dampak sistemiknya meliputi kerugian fiskal negara berkembang (1-3% PDB tahunan), distorsi alokasi modal global, dan ketimpangan kompetisi bisnis. Regulasi anti-penyalahgunaan seperti *Principal Purpose Test* (PPT) dalam tax treaty modern dan inisiatif global seperti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oleh OECD belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan kapasitas otoritas pajak negara berkembang, resistensi negara tax haven membuka data keuangan, serta kompleksitas struktur perusahaan multinasional.

References

- Beer, S., & Loeprick, J. (2023). Profit Shifting and Tax Base Erosion in Africa: Evidence and Policy Responses. *World Development*. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106234>
- Bilicka, K. (2023). The Impact of Anti-Tax Avoidance Directives on Corporate Behavior in the EU. *Fiscal Studies*. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12345>
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 3–15.
- Brauner, Y. (2014). BEPS: An Interim Evaluation. *World Tax Journal*, 6(1), 10–37.
- Bunn, D., & Asen, E. (2024). Global Minimum Tax: Early Evidence and Policy Implications. *National Tax Journal*. <https://doi.org/10.17310/ntj.2024.2.05>
- Cobham, A., & Gibson, L. (2016). The State of Play on Beneficial Ownership. In *Global Alliance for Tax Justice*.

- Crivelli, E., de Mooij, R., & Keen, M. (2023). Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09734-2>
- Darussalam, D., & Ngantung, Y. (2013). *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*. DDTC Publishing.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2008). Penghindaran Pajak: Tinjauan atas Tax Avoidance dan Tax Evasion. In *DDTC Working Paper*.
- Dharmapala, D. (2023). The Economics of International Tax Avoidance: Recent Developments. *Annual Review of Economics*. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081422-123456>
- Dyreg, S. D., Lindsey, B. P., & Thornock, J. R. (2013). Exploring the Role Delaware Plays as a Domestic Tax Haven. *Journal of Financial Economics*, 108(3), 751–772.
- Fuest, C., & Spengel, C. (2024). Pillar Two and the Future of International Corporate Taxation. *International Tax and Public Finance*. <https://doi.org/10.1007/s10797-024-09789-3>
- Garcia-Bernardo, J., & Fichtner, J. (2024). The Offshore World: Tax Havens, Secrecy Jurisdictions, and the Global Economy. *Global Networks*. <https://doi.org/10.1111/glob.12345>
- Gravelle, J. G. (2015). *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*. Congressional Research Service.
- Johannessen, N., & Tørsløv, T. (2024). Tax Havens and the Transparency Revolution: Effects on Cross-Border Investment. *Economic Policy*. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiaa023>
- Leduc, S., & Michel, P. (2024). Digitalization and International Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of International Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2024.103789>
- Lejour, A. (2023). Good tax practices in the fight against tax avoidance: The signalling role of FDI data. *Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament*. <https://doi.org/10.2861/123456>
- Mintz, J., & Weichenrieder, A. J. (2010). *The Indirect Side of Direct Investment: Multinational Company Finance and Tax Havens*. MIT Press.
- Nurdiansyah, R. & Masriyah. (2023). Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(3), 391–398. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i3.2565>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*. OECD Publishing.
- Rahayu, S. K. (2017). Penghindaran Pajak Internasional: Peran Tax Treaty dan Tax Haven. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 120–135.
- Rasyid, A. (2020). Efektivitas Klausul Beneficial Ownership dalam Pencegahan Treaty Abuse pada P3B Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 55–70.
- Riedel, N., & Schindler, D. (2023). Tax Treaties and the Allocation of Taxing Rights: Evidence from Multinational Firms. *European Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2023.104567>
- Rothstein, H. R., Sutton, A. J., & Borenstein, M. (2006). *Publication Bias in Meta-Analysis: Prevention, Assessment and Adjustments*. John Wiley & Sons.
- Schjelderup, G. (2016). Secrecy Jurisdictions. *International Tax and Public Finance*, 23(1), 168–189.
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356.
- Slemrod, J., & Wilson, J. D. (2009). Tax Competition with Parasitic Tax Havens. *Journal of Public Economics*, 93(11–12), 1261–1270.
- Tørsløv, T., Wier, L., & Zucman, G. (2024). The Missing Profits of Nations: 2024 Update. *Review of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1093/restud/rdad123>
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.